

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sembilan Program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Ini penting untuk memiliki kebijakan yang strategis yang mengangkat desa sebagai pusat kedaulatan nasional untuk bersaing di pasar global. Semua daerah akan maju sesuai dengan bidang mereka: sosial, budaya, politik, dan ekonomi, terutama ekonomi. Pembangunan nasional adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata dan menyeluruh. Dengan mewujudkan perekonomian yang merata dan menyeluruh di seluruh masyarakat, ini akan menguntungkan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional (Aditya, 2018).

Pemerintah telah menggunakan berbagai metode untuk membangun basis ekonomi di pedesaan sejak lama. Akan tetapi upaya tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Salah satu faktor yang paling mendominan adalah intervensi pemerintah yang begitu besar, dengan adanya kreativitas masyarakat dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola atau mengelola mesin ekonomi pedesaan. Ini sejalan dengan pendapat bahwa "berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi rakyat, perihal apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya menciptakan kepedulian serta kemampuan pembangunan dari rakyat itu sendiri (Putri Andriani, 2020).

Putri Andriani (2020) mengatakan Upaya untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dikenal sebagai pembangunan nasional. Membangun kemandirian, termasuk di pedesaan, adalah tujuan pembangunan. Sebagian besar orang yang tinggal di Indonesia sendiri tinggal di daerah pedesaan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa daerah pedesaan adalah pusat pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menguntungkan masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjelaskan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas kebutuhan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perkembangan keberadaan BUMDes di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut data yang menunjukkan jumlah BUMDes di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah BUMDes di Indonesia

NO	Tahun	Jumlah BUMDes
1	2014	1.022
2	2015	11.945
3	2016	18.446
4	2017	39.149
5	2018	45.549
6	2019	50.199
7	2020	51.134
8	2021	57.134
9	2022	60.417
10	2023	57.563

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui BUMDes di Indonesia dari tahun ketahun berkembang dengan pesat hingga pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 data menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga memiliki bumdes yang cukup banyak yakni berjumlah 1.702 Bumdes dimana tersebar di seluruh Kabupaten yang ada sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki bumdes sebanyak 139 yang tersebar di 16 Kecamatan yang ada.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan membangun kerataan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu, BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Samadi et al., 2017). Kementerian Desa dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan BUMDes untuk membantu pembangunan infrastruktur yang mendukung dan memperluas usaha ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes adalah bentuk kemandirian ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi desa. BUMDes mengoptimalkan aset desa, memberdayakan usaha masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa masyarakat. BUMDes didirikan untuk menampung semua kegiatan di bidang ekonomi dan/atau publik pelayanan yang dikelola oleh desa (Dhewanto et al., 2020).

BUMDes adalah bentuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kolektif, aktif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi dengan baik, efisien, profesional, dan mandiri, diperlukan upaya yang

cukup besar untuk menjalankannya. Untuk mencapai tujuan BUMDes, kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat harus dipenuhi melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang baik yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Ade, 2016).

BUMDes di suatu daerah akan membantu usaha-usaha meningkatkan ekonomi, dan BUMDes juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Program BUMDes dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan potensi desa. BUMDes disusun berdasarkan program usaha yang akan dibentuk dan dikembangkan. Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. BUMDes adalah lembaga yang bekerja di bidang ekonomi dan sosial untuk membantu orang-orang di bidang usaha (Ramadana and Ribawanto, 2010)

BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan dasar. BUMDes juga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. BUMDes sendiri sangat penting bagi masyarakat agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnis mereka sendiri. Pendirian dan pelaksanaan BUMDes adalah tindakan penting yang dilakukan oleh masyarakat desa. BUMDes ini memiliki kemampuan untuk memperkuat gagasan tentang tradisi berdesa dan menjadi wadah kolektif untuk kehidupan beragama dan bermasyarakat. Akibatnya, BUMDes sangat penting bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan (Pradnyani, 2018).

BUMDes diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program yang sesuai dengan potensi Desa. BUMDes memiliki misi yang

kelas untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Desa, utamanya masyarakat. BUMDes membangun bisnis seperti BRI *Link*, Simpan Pinjam, dan peminjaman modal usaha dengan tujuan membantu masyarakat dalam hal permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga menciptakan lapangan kerja. Menurut sumber, masyarakat desa Babadan secara keseluruhan senang dengan kinerja BUMDes selama satu tahun ini, terutama bagi masyarakat (Agung et al., 2023)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan perekonomian anggotanya?
2. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian anggotanya di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana korelasi peran BUMDes dengan peningkatan perekonomian anggotanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan perekonomian anggotanya.
2. Melihat peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian anggotanya di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Menganalisis korelasi peran BUMDes dengan peningkatan perekonomian anggotanya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih paham seperti apa peran BUMDes yang ada di Dalam Desa.
2. Bagi petugas BUMDes sebagai salah satu tolak ukur kinerja pegawainya dalam meningkatkan perikonomian di dalam Desa.
3. Bagi akademik menambah khasanah pengetahuan, keilmuan dan menjadi referensi bagi para penelitian baik mahasiswa/I pelajar dan balai penelitian pada kajian subjek pertanian.
4. Bagi Peneliti lain, dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenisnya.
5. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khurniatul Jannah (2022) dengan judul *Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan berperan dalam kemitraan UMKM. Sementara itu dalam mengurangi urbanisasi hanya BUMDes di Desa Bejiharjo yang dapat berperan dalam mengurangi urbanisasi. BUMDes di Desa Bejiharjo dapat menjadi rujukan bagi BUMDes di Desa Ngawis dan Gedangrejo untuk terus meningkatkan pengelolaannya agar dapat berperan dalam mengurangi urbanisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Srimuliana, Furqani, and Jalilah (2022) dengan judul *Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Awe Seubal. Strategi yang digunakan oleh pengelola BUMDes mampu meningkatkan pendapatan dan sektor keuangan desa. Serta dampak pencapaian berupa output keberhasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Andriani (2020) dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BUMDes Sejahtera Muara Uwai, Kec Bangkinang, Kab Kampar)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan BUMDes Sejahtera Muara Uwai menunjukkan bahwa BUMDes Muara Uwai telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui simpan pinjam, depot air, produksi makanan dan kredit syaria dan juga telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibandingkan sebelum mendapatkan pinjaman dana yang diberikan BUMDes Sejahtera Muara Uwai. Adapun tujuan ekonomi syariah sudah menunjukkan bahwa peran BUMDes Sejahtera Muara Uwai sudah berjalan sesuai syariat dengan menerapkan prinsip tolong menolong.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira (2021) dengan judul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data Kualitatif Deskriptif dan *Korelasi Rank Spearman*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes sudah dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaan program nya, terbukti dari data pendapatan masyarakat dilapangan bahwasanya pendapatan masyarakat Desa Suka Ramai telah terjadi peningkatan walaupun belum merata, tetapi masyarakat sudah merasakan adanya peningkatan pendapatan setelah adanya BUMDes. Peran BUMDes sebagai Pengungkit Perekonomian Desa memiliki nilai rata-rata 91% dengan kategori sangat baik. Dan peranan BUMDes

sebagai Pendukung Kegiatan Usaha memiliki nilai rata-rata sebesar 90%. Sementara hasil korelasi bahwa peranan BUMDes mempunyai hubungan yang kuat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka, atau bersifat deskriptif yaitu penggambaran. Metode kualitatif diukur dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari data lisan dan tertulis. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yaitu dengan tahap pengumpulan data, penyajian dan reduksi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan BUMDes belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung. Kurang efektifnya pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan oleh BUMDes Berkah karena di pengaruhi oleh beberapa hal seperti; jenis usaha yang terbatas, pengelolaan yang kurang baik, intervensi pemerintah yang berdampak kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan BUMDes. (2) Pendekatan yang digunakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes adalah pendekatan sumber dan pendekatan proses. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes telah dijalankan meskipun belum mampu memberikan efek terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Tandung. (3) Sasaran dari pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes adalah

masyarakat yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes Berkah Desa Tandung belum mampu mencapai sasarnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; sumber finansial yang terbatas, meningkatnya pesaing usaha dan kualitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas penulis mengambil referensi acuan kepada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khurniatul Jannah, (2022) dengan judul Peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul karena di bandingkan dengan penelitian yang lain penelitian ini yang paling efisien atau mendekati.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Desa

Desa adalah hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan ini menghasilkan wujud atau ketampakan di muka bumi yang dibentuk oleh unsur-unsur fisiografis (*fisis*), sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berhubungan satu sama lain dan antara satu sama lain. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa desa, desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan (Nursetiawan, 2018).

2.2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mensejahterakan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa (Undang-undang No.43 Tahun 2014). Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan memanfaatkan kekayaan desa untuk dikelola dan dievaluasi dengan mempertimbangkan tujuannya. M.Zulkarnaen (2017). Adanya BUMDes sendiri di suatu daerah akan memungkinkan usaha untuk meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada kesepakatan masyarakat, kemauan dan kemampuan dari setiap kelompok masyarakat secara kolektif, kekeluargaan, dan gotong-royong. BUMDes disesuaikan dengan potensi desa berdasarkan program usaha yang akan dibentuk dan dikembangkan. Program BUMDes dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki struktur organisasi yang fleksibel. BUMDes adalah lembaga yang bekerja di bidang ekonomi dan sosial untuk membantu orang-orang di bidang usaha (Prasetyo, 2017).

Pilar kegiatan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui pemasaran barang dan jasa lokal. Prinsip efektifitas dan efisiensi harus selalu ditekankan saat mereka bekerja (Nafisah, 2023).

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Brawijaya, 2007).

2.2.3. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tujuan dari adanya BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memajukan perekonomian desa, dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. BUMDes sifat usahanya berorientasi pada keuntungan, sedangkan sifat pengelolaan usahanya adalah, kejujuran, berkeadilan, partisipatif dan keterbukaan (Suwendra & Sujana, 2020).

Nugroho & Suprpto (2021) menjelaskan BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga yang komersial melalui penawaran sumber daya lokal milik desa, kemudian bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Selain itu

juga sebagai lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Tujuan utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya untuk menjalankan usaha mereka. BUMDes juga dapat mendirikan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dan dikelola untuk mengelola ekonomi produktif desa secara kolaboratif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya besar untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut mandiri, efisien, profesional, dan efektif. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
 2. Meningkatkan pendapatan asli desa
 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan
- (Nafisah, 2023).

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal ini didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa serta penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan. Tujuan akhir dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan BUMDes

adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa (Brawijaya, 2007).

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: Sebagai Simpan Pinjam, Edisi Bank BRI *Link*, dan Pinjaman Modal Usaha. Unit yang berada didalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Unit jasa simpan pinjam dengan kegunaan anggota tidak hanya dapat dengan mudah menyimpan uangnya akan tetapi mudah juga dalam pengajuan pinjaman jika di butuhkan dana mendesak.
2. Unit jasa keuangan missal jika dalam proses keuangan memiliki kendala bias di bantu melalui edisi Bank BRI *Link* dengan banyak kegunaan di antaranya pencairan tunai tranver antar bank dll.
3. Unit usaha sektor rill/ekonomi missal mengajukan dana pinjaman untuk modal usaha.

2.3. Teori Peran (*Role Theory*)

Interaksi ini mengandung peran dan harapan dari individu atas kinerjanya dalam suatu posisi, terdapat harapan mengenai perilaku peran, perilaku peran individu dipengaruhi oleh sebuah lingkungan organisasi. Dengan demikian peran merupakan, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu, atau kelompok, dalam organisasi guna dapat melaksanakannya secara bersama-sama dengan perannya

masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, seperti apa yang telah ditentukan oleh organisasi (Mulianingsih, 2022)

2.3.1. Indikator Peran

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut. Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya.

2.3.2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

David Wijaya (2018) menjelaskan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa,

pemanfaatan asset desa dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat.

BUMDes, sebagai lembaga ekonomi masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika BUMDes dapat dikelola dengan optimal, desa akan menjadi mandiri karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengelolanya dengan baik (Prasetyo, 2019).

Peran BUMDes menurut PP Nomor 11 tahun 2021 ada delapan peran yaitu:

- a. Konsolidasi produk barang atau jasa masyarakat desa;
- b. Produksi barang atau jasa;
- c. Pcnampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas asset Desa dan pendapatan asli Desa

2.4. Teori Perekonomian

Sudah sejak lama, pemerintah telah menggunakan berbagai program untuk mendorong perekonomian di daerah pedesaan. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

sekitarnya maupun dengan berpartisipasi dalam membangun sistem ekonomi nasional. Pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa adalah salah satu pendekatan baru yang diharapkan dapat mendorong dan mendorong perekonomian di pedesaan. agar lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok pedesaan yang memiliki modal besar. Jadi, lembaga itu dimiliki oleh desa dan dikontrol bersama, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, perkembangan BUMDes harus disertai dengan persaingan (Sasauw,2018).

2.4.1. Peningkatan Perekonomian

Peningkatan perekonomian adalah usaha yang dilakukan untuk menambah nilai produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. (Widyasari, 2020) .

Dalam hal ini, ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi masyarakat. Sebagian dari ekonomi masyarakat terdiri dari kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Usaha kecil dan menengah (UKM) biasanya termasuk bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Perekonomian bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta untuk mencapai kemudahan dan kepuasan. Kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang produktif akan tercipta jika kebutuhan masyarakat dipenuhi (Mudatsir, 2019).

a. Indikator Pertumbuhan Sektor Usaha Ekonomi

Soleh (2008) mengatakan sebuah usaha ekonomi dapat dikatakan berkembang dan mengalami peningkatan dilihat dari omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, serta pertumbuhan dilihat dari indikator keberhasilan dan usaha dari beberapa ahli, dalam penelitian ini guna melihat peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rambah Muda menggunakan indikator omzet dan keuntungan atau laba.

1. Omzet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi omzet adalah jumlah hasil penjualan (dagangan), omzet penjualan total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba - rugi perusahaan (laporan operasi) selama periode penjualan tertentu. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan omzet penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah barang yang diproduksi selama suatu masa jual.

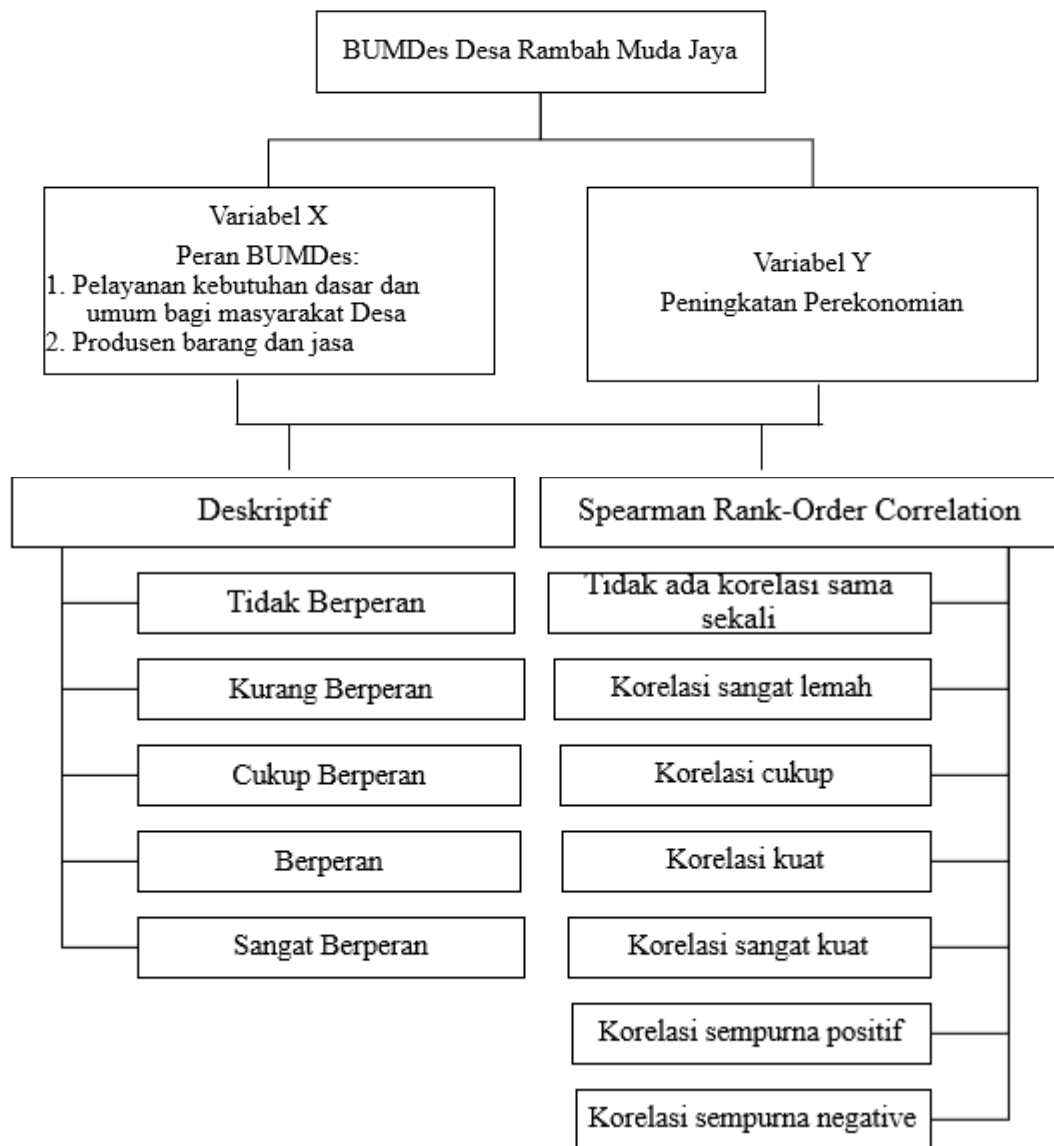
2. Keuntungan atau laba

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan/*opportunity cost*). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

2.5. Kerangka Pikir Penelitian

Peran BUMDes menurut PP Nomor 11 tahun 2021 dalam penjelasan memiliki delapan peran di antaranya Peran Pertama sebagai konsolidator Produk/Jasa Masyarakat, kedua sebagai produk barang dan jasa yang ketiga sebagai penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa yang keempat sebagai inkubasi usaha masyarakat Desa yang kelima sebagai stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa yang keenam sebagai pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa yang ketujuh sebagai peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam dan yang ke delapan sebagai peningkatan nilai tambah atas asset Desa dan pendapatan asli Desa. Namun sampai saat ini BUMDes Rambah Muda Jaya hanya menjalankan 2 Peran saja yakni sebagai pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa dan sebagai produsen barang dan jasa. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar kerangka fikir dibawah ini.

Berdasarkan gambar 2.1. dibawah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes simpan pinjam terhadap peningkatan perekonomian anggota. Dari setiap variabel - variabel tersebut, apakah peran BUMDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan perekonomian anggota simpan pinjam BUMDes Rambah Muda Jaya Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Peran BUMDes Dalam peningkatan Perekonomian
anggotanya di Desa Rambah Muda

2.6. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini yaitu diduga

1. BUMDes Rambah Muda Jaya sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Korelasi peran BUMDes Rambah Muda Jaya dengan peningkatan perekonomian anggotanya sangat kuat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir. Penentuan daerah lokasi penelitian dilakukan secara *Purposive* (sengaja), dengan pertimbangan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah berada pada tahap berkembang. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2023 – Februari 2024.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BUMDes Rambah Muda Jaya Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang berjumlah 126 anggota, terdiri dari: anggota Simpan Pinjam sebanyak 78 orang, Edisi Bank BRI *Link* Petani kredit bank Syariah sebanyak 33 orang dan pengusaha kecil (pinjaman modal usaha) 35 orang. Jumlah sampel pada penelitian ditentukan dengan menggunakan formula *Slovin* yaitu:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan : n Jumlah Sampel minimal

N adalah Populasi

Nilai e adalah error margin

Diketahui N : 126

$$e = 10\% = 0,01$$

sehingga : $n = 126 / (1 + (126 \times 0,01^2))$

$$n = 126 / (1 + 1,26)$$

$$n = 126 / 2,26$$

$$n = 55,75$$

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 56 orang.

Jumlah sampel dari masing-masing jenis keanggotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Masing-Masing Jenis Keanggotaan BUMDes

NO	Jenis	Populasi	Sampel
1.	Simpan Pinjam	78	35
2.	BRI <i>Link</i>	33	15
3.	Pinjaman Modal Usaha	15	6
Jumlah		126	56

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu penulis langsung terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada anggota BUMDes Rambah Muda dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevaliditan atau kesahihan suatu instrument. Uji validitas sangatlah penting untuk

dilakukan baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tanpa adanya validitas maka penelitian tidaklah efektif (Janna & Herianto, 2021).

Pengujian validitas menggunakan alat ukur untuk uji *Pearson Product Moment* yang ada pada aplikasi SPSS 20,0 dengan ketentuan pada taraf signifikan 95% dan $\alpha = 0,05$ maka instrument itu dianggap *valid*.

Uji validitas digunakan untuk menghitung *korelasi* antara masing – masing pernyataan dengan skor total dengan rumus *korelasi product moment* (Iqbal, 2008)

2. Reabilitas

Janna & Herianto, (2021) reliabilitas merupakan instrument yang dapat di percaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrument tersebut sudah baik. Jika data benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapakai diambil akan tetap sama. uji reliabilitas juga diuji menggunakan rumus Alpha Cronbach pada aplikasi SPSS 20,0. Dengan ketentuan jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$) dapat dikatakan reliable, sedangkan jika nilai *Alpha Cronbach* lebih kecil dari 0,60 ($\alpha < 0,60$) maka instrument dikatakan tidak reliable.

3.4.2. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menentukan peran BUMDes Rambah Muda Jaya dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsikan hasil kuantifikasi data kualitatif yang diperoleh. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pada setiap indikator peran disusun pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan 5 kategori yaitu: (1) Tidak Berperan, (2) Kurang Berperan, (3)

Cukup Berperan (4) Berperan (5) Sangat Berperan. Berdasarkan bobot tersebut maka disusun indeks skor dan interval skor sebagai berikut: (Putri, 2016)

a. Menghitung *Indeks Skor*

$$\text{Indeks Skor (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Menghitung Skor Maksimal

Skor Maksimal

= Jumlah Responden X Skor Tertinggi Likert X Jumlah Pertanyaan

b. Interval

$$\text{Interval} = \frac{\text{Indek Skor max} - \text{Indek skor min}}{\text{banyak kelas}}$$

Nilai kategori masing-masing interval dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Skala Interval Pada BUMDes

No	Interval	Kategori
1	0% - 19.99%	Tidak Berperan
2	20% - 39.99%	Kurang Berperan
3	40% - 59.99%	Cukup Berperan
4	60% - 79.99%	Berperan
5	80% - 100%	Sangat Berperan

Sumber : Sugiyono, 2014

3.4.3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk menguji keeratan hubungan (korelasi) antara variable peran BUMDes dan peningkatan perekonomian anggotanya dalam hal ini digunakan uji *the Spearman rank-order correlation coefficient*.

a. Hipotesis:

$H_0: b_i = 0$, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variable peran BUMDes dengan peningkatan perekonomian anggotanya.

$H_a : b_i \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variable peran BUMDes dengan peningkatan perekonomian anggotanya

Adapun tingkat kriteria pengujian:

- Jika taraf signifikansi $\leq \alpha$, maka tolak H_0 .
- Jika taraf signifikansi $> \alpha$, maka terima H_0 .

b. Formula uji *the Spearman rank-order correlation coefficient*

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum D_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

r_s adalah koefisien *the Spearman rank-order correlation*

D adalah Selisih antara nilai peran dan perekonomian

n adalah jumlah sampel

Koefisien *the Spearman rank-order correlation* akan bergerak antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Artinya koefisien akan semakin memiliki hubungan yang erat jika mendekati 1 atau -1, dengan kriteria sebagai berikut

0	: Tidak ada korelasi sama sekali
0,01 - 0,25	: Korelasi sangat lemah
0,26 - 0,50	: Korelasi cukup
0,51 – 0,75	: Korelasi kuat
0,76 – 0,99	: Korelasi sangat kuat
1	: Korelasi hubungan sempurna positif
-1	: Korelasi hubungan sempurna negative

3.5. Definisi Operasional Konsep Pengukuran variabel

1. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Ekonomi atau Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian, yang juga disebut sebagai sistem ekonomi.
3. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
4. Peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
5. Peran BUMDes Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat.